

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai pendapat dan persepsi masyarakat yang terkadang menyimpang dari kode etik profesi akuntan seolah-olah menghilangkan kredibilitas profesi. Kasus Enron Corporation di Amerika Serikat adalah salah satu yang telah mencuri perhatian publik global karena telah melakukan manipulasi laporan keuangan, mencatat keuntungan 600 juta dolar AS padahal sebenarnya perusahaan mengalami kerugian. Keinginan perusahaan untuk mempertahankan minat investor pada sahamnya adalah dasar dari manajemen keuntungan (Kusmayadi, 2012).

Runtuhnya perusahaan seperti Enron, Lehman Brothers, dan Parmalat menunjukkan betapa pentingnya etika dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Karena transaksi dilakukan sesuai dengan aturan, pendekatan "aturan versus prinsip" sedikit berkontribusi pada penyimpangan perusahaan ini. Namun, konsekuensi etisnya mungkin telah diabaikan. Dengan kata lain, pertimbangan etis diabaikan ketika keputusan perusahaan dibuat. Skandal Enron tersebut seharusnya tidak terjadi jika setiap akuntan memiliki pengetahuan, pemahaman dan menetapkan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya (Paath & Mardatillah, 2017).

Kasus Enron merupakan awal mula timbulnya kasus yang lainnya seperti kasus Xerox, PT Kimia Farma dan Lippo Bank yang menimbulkan

konflik kepentingan banyak pihak, sehingga berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas profesi akuntan (Desfiandi, 2009). Hal ini membuktikan bahwa akuntan harus benar-benar menggunakan pertimbangan etikanya dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus Enron, penilaian etika menunjukkan betapa pentingnya integritas, kejujuran, dan akuntabilitas dalam dunia bisnis. Seperti yang terjadi dalam kasus ini, etika bisnis yang buruk mengancam kepercayaan masyarakat pada perusahaan dan pasar modal secara keseluruhan. Selain itu, tidak etis bagi perusahaan untuk tidak memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Karena manajemen Enron menyembunyikan banyak informasi tentang utang dan kerugian, pemangku kepentingan tidak dapat melihat keadaan sebenarnya perusahaan.

Menurut Rachmat Djatnika (1992), istilah "etika" dan "akhlak" adalah kata sinonim. Dalam hubungannya dengan akhlak dan etika, mereka digambarkan sebagai ruh dan jasad, dengan akhlak dianggap sebagai ruh dan etika dianggap sebagai jasad. Etika dan akhlak memiliki tujuan yang sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari perbuatan manusia yang baik dan buruk. Salah satu ayat *al-Qur'an* yang memerintahkan untuk berakhlak baik terdapat pada surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلنَّفْسِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Nilai-nilai moral yang ditemukan dalam kitab suci *al-Qur'an* dan Sunnah Rasul adalah dasar bagi etika umat Islam. Karena nilai-nilai moral dan etika merupakan dasar dari tata nilai Islam yang harus dihormati. Jika informasi atau berita disampaikan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam, itu akan menyebarkan kebohongan di masyarakat (Amril, 2017).

Standar etika yang dipegang oleh seseorang mempengaruhi bagaimana mereka membuat keputusan tentang masalah etis. Masalah etika akuntansi berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi dalam melaksanakan tugasnya. Masalah ini berkaitan dengan praktik akuntansi yang tidak etis yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan manajemen, dan akuntan pemerintahan.

Untuk mewujudkan pelayanan publik perlu dikembangkan sikap dan perilaku keteladanan serta penerapan nilai-nilai konsistensi dan tanggung jawab. Moralitas dan etika menjadi hal penting yang mengatur individu berperilaku dalam sebuah organisasi. Penguatan dasar seseorang untuk melakukan penilaian etika juga dipengaruhi oleh pemahaman dan penerapan nilai yang sejalan dengan individu. Selain perilaku keteladanan dan penerapan nilai-nilai konsistensi, ada beberapa faktor pendukung yang dijadikan sebagai penilaian etis yaitu nilai etika perusahaan dan sosial konsensus.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penilaian etis yang dilakukan oleh individu tentang berbagai pilihan moral adalah ideologi etis, yang berasal dari penelitian (Bass et al., 1998). Ideologi etis adalah sistem etika yang digunakan untuk membuat penilaian moral, yang merupakan pedoman untuk menilai dan menyelesaikan perilaku yang mungkin dipertanyakan secara etis (Henle et al., 2005).

Marques & Pereira (2009) meneliti ideologi etis dan penilaian etis dalam profesi akuntansi Portugis. Hasil menunjukkan bahwa penilaian etis tidak berbeda secara signifikan berdasarkan ideologi etika (filsafat moral pribadi) antara responden. Namun, penelitian tersebut menunjukkan bahwa relativisme mungkin memiliki efek yang lebih kuat pertimbangan etis daripada idealisme.

Selain idealisme moral, ada faktor lain, yaitu budaya etika perusahaan atau nilai etika perusahaan yang jika diterapkan dengan benar dapat mempengaruhi tindakan yang tidak efektif. Menurut Hayunigtyas & Murtanto (2014) nilai etika perusahaan terdiri dari berbagai praktik yang dijalankan oleh manajemen serta nilai-nilai yang menyertainya. Sistem nilai perusahaan terdiri dari akulturasi berbagai nilai yang ada di dalam dan di luar perusahaan. Nilai etika perusahaan ditunjukkan oleh para atasan, yang sangat penting untuk menjaga suasana kerja yang baik. Nilai-nilai ini sangat penting untuk mencegah perilaku menyimpang (Rezkyanti & Fitriawan, 2020)

Jones (1991) menyatakan bahwa konsep intensitas moral mempengaruhi perilaku etis. Faktor internal (seperti kepribadian) dan faktor situasional atau lingkungan mempengaruhi perilaku seseorang. Salah satu dari enam dimensi intensitas moral, konsensus sosial, menjelaskan bahwa persepsi sosial tentang sesuatu dapat mempengaruhi keputusan etis. Ini menunjukkan bahwa konsensus sosial adalah komponen penting dalam mengurangi penyimpangan etika. Karena fenomena akan konsensus sosial yang mengarah pada persetujuan masyarakat tentang penyimpangan etika, pemerintah harus mengetahui pemetaan konsensus sosial masyarakat tentang penilaian etika agar mereka dapat menetapkan titik awal tindakan pencegahan.

Teori perkembangan moral kognitif, yang dikembangkan oleh Kohlberg pada tahun 1969, adalah teori yang sering digunakan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan etis dan untuk memahami alasan mengapa seseorang mengambil keputusan etis. Teori perkembangan moral kognitif, yang dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg berfokus pada perkembangan dan evolusi pemahaman individu tentang moralitas. Teori ini mengidentifikasi serangkaian tahapan perkembangan moral yang melibatkan perubahan dalam pemikiran moral individu dari tingkat yang lebih sederhana hingga tingkat yang lebih kompleks. Teori perkembangan moral kognitif dapat memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor seperti idealisme moral, nilai etika perusahaan, dan sosial konsensus dapat

mempengaruhi penilaian etika individu, dengan pengakuan etika sebagai variabel mediasi, dalam kerangka perkembangan moral kognitif.

Dalam kerangka teori perkembangan moral kognitif, pengakuan etika dapat berperan sebagai variabel mediasi yang memediasi hubungan antara faktor-faktor seperti idealisme moral, nilai etika perusahaan, sosial konsensus, dan penilaian etika individu. Pengakuan etika dapat mencerminkan pemahaman individu tentang norma-norma moral yang diterima dan nilai-nilai yang diinternalisasi dalam perkembangan moral mereka. Dengan menggunakan teori perkembangan moral kognitif, akan dapat memahami bagaimana individu dalam tahap perkembangan moral yang berbeda mungkin memberikan penilaian etika yang berbeda-beda terkait dengan pengaruh idealisme moral, nilai etika perusahaan, dan sosial konsensus.

Mengacu pada penelitian oboh (2019) dan ghazali (2021), penelitian ini akan meneliti tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *ethical judgement*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian dan alat analisis penelitian. Penelitian ini memilih instansi pemerintahan sebagai objek penelitian dan menggunakan alat analisis PLS (Partial Least Square) melalui software *SmartPLS*. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan SPSS dengan objek penelitian pada perusahaan non keuangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Oboh (2019) tidak meneliti perilaku etis karena mengalami bias dalam pengukurannya. Penelitian yang dilakukan oleh Mohd Ghazali (2021) juga

belum menganalisis faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *ethical judgement*.

Kebaruan dari penelitian ini yaitu dengan menambahkan *ethical recognition* sebagai variabel mediasi karena belum banyak dilakukan serta bertujuan agar model penelitian menjadi lebih komprehensif. *Ethical recognition* sebagai variabel antara (mediasi) yang menjembatani hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dimana pemunculan variabel mediasi berawal dari asumsi bahwa variabel independen memiliki hubungan kausal dengan variabel dependen. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa efek pada hubungan antara pengakuan etika individu dan niat terlibat dalam penilaian etika dengan kepentingan yang dirasakan. Temuan ini diperluas untuk menguji hubungan antara kedua faktor yang mengungkapkan bahwa pengakuan etika dan penilaian etika merupakan prediktor yang baik dari niat etika (Yang & Wu, 2009).

Penelitian ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Oboh (2019) dan Mohd Ghazali (2021) tentang analisis faktor yang mempengaruhi penilaian etis (*ethical judgement*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel idealisme moral (*moral idealism*) sebagai aspek personal, variabel nilai etika perusahaan (*corporate ethical value*) sebagai aspek organisasi dan variabel sosial konsensus (*social consensus*) sebagai aspek moral intensity dan menguji pengakuan etika (*ethical recognition*) sebagai mediasi terhadap penilaian etika (*ethical judgement*).

Pengakuan etis sebagai variabel antara (mediasi) yang menjembatani hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dimana pemunculan variabel mediasi berawal dari asumsi bahwa variabel independen memiliki hubungan kausal dengan variabel dependen. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa efek pada hubungan antara pengakuan etika individu dan niat terlibat dalam penilaian etika dengan kepentingan yang dirasakan. Temuan ini diperluas untuk menguji hubungan antara kedua faktor yang mengungkapkan bahwa pengakuan etika dan penilaian etika merupakan prediktor yang baik dari niat etika (Yang & Wu, 2009).

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Moral Idealism*, *Corporate Ethical Value*, *Social Consensus* terhadap *Ethical Judgement* dengan *Ethical Recognition* sebagai Variabel Mediasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *moral idealism* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement*?
2. Apakah *corporate ethical value* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement*?
3. Apakah *social consensus* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement*?

4. Apakah *ethical recognition* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement*?
5. Apakah *moral idealism* berpengaruh positif terhadap *ethical recognition*?
6. Apakah *corporate ethical value* berpengaruh positif terhadap *ethical recognition*?
7. Apakah *social consensus* berpengaruh positif terhadap *ethical recognition*?
8. Apakah *moral idealism* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* sebagai variabel mediasi?
9. Apakah *corporate ethical value* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* sebagai variabel mediasi?
10. Apakah *social consensus* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* sebagai variabel mediasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif *moral idealism* terhadap *ethical judgement*.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif *corporate ethical value* terhadap *ethical judgement*.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif *social consensus* terhadap *ethical judgement*.

4. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh positif *ethical recognition* terhadap *ethical judgement*.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh positif *moral idealism* berpengaruh positif terhadap *ethical recognition*.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh positif *corporate ethical value* terhadap *ethical recognition*.
7. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh positif *social consensus* terhadap *ethical recognition*.
8. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif *moral idealism* terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* sebagai variabel mediasi.
9. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif *corporate ethical value* terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* sebagai variabel mediasi.
10. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif *social consensus* terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* sebagai variabel mediasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akuntansi yaitu dalam bidang keperilakuan terkait dengan penilaian etika seorang akuntan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penyusunan penelitian pada masa yang akan datang terkait dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat membantu akuntan untuk memahami dan mematuhi standar etika profesi akuntan untuk memahami dan mematuhi standar etika profesi akuntansi, seperti yang ditetapkan oleh badan pengatur seperti *International Federation of Accountants* (IFAC). Penilaian etika juga diharapkan membantu mengidentifikasi dan mencegah praktik akuntansi yang tidak etis seperti manipulasi laporan keuangan, penipuan, atau pelanggaran etika lainnya.